

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Perilaku Pemilih

1. Perilaku Memilih

Ramlan Surbakti (2010:185) memandang perilaku memilih sebagai keikutsertaan warga negara dalam pemilu yang juga menjadi serangkaian kegiatan membuat keputusan yakni memilih atau tidak, dan jika memilih apakah memilih kandidat X atau kandidat Y.

Perilaku memilih (*voting behavior*) dalam pemilu merupakan salah satu bentuk perilaku politik (*political behavior*). Pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada konstantan yang bersangkutan. Firmanzah (2008: 87) mengemukakan bahwa dinyatakan sebagai pemilih dalam pilkada, yaitu mereka yang telah terdaftar sebagai peserta pemilih oleh petugas pendata peserta pemilu. Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat pada umumnya.

Menurut Mahendra (2005:75) konsep perilaku memilih adalah tindakan seseorang ikut serta dalam memilih orang, partai politik, atau isu publik tertentu. Perilaku memilih merupakan tindakan seseorang dalam memberikan pilihan pada calon elit politik, partai politik atau isu politik tertentu.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa perilaku memilih merupakan suatu tindakan seseorang untuk memberikan suara dalam pemilihan umum, dimana yang menjadi perhatian adalah mengapa seorang pemilih memilih partai tertentu atau kandidat tertentu dan bukan partai lain atau kandidat lainnya.

2. Perilaku Tidak Memilih (Golput)

Perilaku pemilih merupakan tindakan pemilih terkait pemilihan langsung, salah satu perwujudan dari perilaku pemilih adalah konsep perilaku memilih. Berbeda dengan konsep tersebut, terdapat sebuah pandangan yang bertolak belakang dengan konsep perilaku memilih, yaitu konsep perilaku tidak memilih yang dalam kondisi tertentu dikenal dengan istilah golongan putih (golput).

Golput adalah sikap tidak memilih dalam pemilihan umum yang didasarkan pada pandangan bahwa aturan main berdemokrasi tidak ditegakkan dan cenderung diinjak-injak (Fadillah Putra, 2003: 104). Pahmi Sy (2010: 65) menyatakan bahwa golput dipandang sebagai kelompok orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam suatu pemilihan. Sejak

awal ada sekelompok orang yang tidak mau didaftarkan sebagai pemilih sehingga tahapan pemilu tidak diikutinya. Selain itu ada juga sekelompok orang yang terdaftar sebagai pemilih, tetapi tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara. Golput juga merupakan bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap objek politik, hal ini seperti yang dikemukakan Arief Budiman dalam Joko J. Prihatmoko (2003:150) yang mengatakan bahwa:

“Golput bukan organisasi, tanpa pengurus, dan hanya merupakan pertemuan solidaritas. Golput adalah sebuah identifikasi bagi mereka yang tidak puas dengan keadaan dan aturan main demokrasi yang diinjak-injak oleh partai politik dan pemerintah demi memenangkan pemilu dengan menggunakan aparat negara melalui cara di luar batas aturan main demokratis. Keberadaan golput mengindikasikan bahwa proses politik yang sedang berlangsung tidak benar. Kendati memiliki kekuatan politik, golput melakukan gerakkannya dengan diam.”

Berdasarkan penjelasan di atas, perilaku tidak memilih pada dasarnya diartikan sebagai suatu bentuk keputusan sekelompok orang untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Hal tersebut dilakukan baik dengan sengaja dan tanpa tujuan yang jelas untuk tidak menggunakan hak pilihnya sebagai wujud protes politik dikarenakan suatu perasaan ketidakpuasan dalam kehidupan masyarakat, ataupun dikarenakan faktor lain yang membuat seseorang terkendala dalam menggunakan hak pilihnya.

3. Pendekatan Perilaku Pemilih

Ramlan Surbakti (2010:145) menyatakan bahwa terdapat beberapa pendekatan dalam mengkaji alasan pemilih memilih kontestan tertentu dalam pemilihan diantaranya:

- a. Pendekatan Struktural yang melihat kegiatan memilih sebagai sebagai produk dari kontes struktur yang lebih luas, seperti struktur sosial (struktur sosial yang menjadi sumber kemajemukan politik dapat berupa kelas sosial, agama, bahasa dan nasionalisme), sistem partai, sistem pemilihan umum, permasalahan, dan program yang ditawarkan oleh setiap partai.
- b. Pendekatan Sosiologis yang cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial. dimana pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi oleh latar belakang demografi dan sosial ekonomi seperti jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan kelas, pendapatan dan agama.
- c. Pendekatan Ekologis yang hanya relevan jika dalam suatu daerah pemilihan terdapat perbedaan karakteristik pemilih berdasarkan unit teritorial.
- d. Pendekatan Psikologi Sosial berupa identifikasi partai dimana partai yang secara emosional dirasakan sangat dekat yang selalu dipilih tanpa terpengaruh oleh faktor lain.
- e. Pendekatan Pilihan Rasional yang melihat kegiatan memilih merupakan produk kalkulasi untung dan rugi.

Pengklasifikasian pendekatan untuk melihat perilaku pemilih juga dikemukakan oleh Adman Nursal (2004:54), secara umum terbagi atas empat pendekatan yakni pendekatan sosiologis disebut sebagai Mazhab Columbia (*The Columbia of Electoral Behavioral*), pendekatan psikologis disebut sebagai Mazhab Michigan (*The Michigan Survey Research Center*) dan pendekatan rasional serta pendekatan domain kognitif (pendekatan *marketing*)

a. **Pendekatan Sosiologis**

Mengenal mashab sosiologis, Marbawi (*Litbang Media Group*), seperti yang dikutip oleh A.A Oka Mahendra (2005:75), menyatakan bahwa “latar belakang pilihan atas partai, calon dan isu, ditentukan oleh karakteristik sosial pemilih. Misalkan, agama, etnik atau kedaerahan. Seseorang akan memilih partai atau figur tertentu karena ada kesamaan karakteristik sosial antara si pemilih dan karakteristik sosial figur atau partai.

Menurut Muhammad Asfar dalam Adman Nursal (2004:55):

"Pendekatan sosiologis pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku pemilih. Pengelompokan sosial seperti umur (tua, muda), jenis kelamin, agama dan sebagainya, dianggap mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam membentuk perilaku pemilih”.

Model sosiologis mengasumsikan bahwa perilaku pemilih ditentukan oleh karakteristik sosial, pengelompokan sosial pemilih, dan

karakteristik sosial tokoh atau partai yang dipilih atau pemilih memiliki orientasi tertentu terkait karakteristik dan pengelompokan sosialnya dengan pilihan atau partai atau calon tertentu.

Oleh karena itu pada pendekatan sosiologis akan menekankan pada dua aspek yaitu :

- a) Pengelompokan sosial dilihat dari pola hubungan sosial seperti hubungan pertemanan, kekeluargaan dan kekerabatan serta kelompok sosial lainnya seperti profesi dan organisasi yang diikuti.
- b) Karakteristik sosial yang dilihat orientasi pemilih terhadap karakteristik sosial kandidat seperti usia, jenis kelamin, agama, etnis dan lain-lain.

b. Pendekatan Psikologis

Pendekatan psikologis atau yang sering disebut juga mazhab michigan sebagaimana diungkapkan oleh A.A. Oka Mahendra (2005:76) bahwa,

“faktor-faktor sosiologis seperti kesamaan agama atau etnik tidak akan fungsional mempengaruhi keputusan pemilih, jika sejak awal belum terbentuk persepsi dan sikap pribadi pemilih terhadap faktor-faktor sosial, maupun terhadap faktor sosial yang dilekatkan pada partai atau calon tertentu. Harus sudah terbentuk dalam diri pemilih bahwa dirinya termasuk dalam satu golongan atau segmen sosial tertentu, sekaligus terbentuk persepsi dari diri yang bersangkutan bahwa partai atau figur tertentu juga diidentikkan dengan kelompok atau segmen sosial yang sama dengan diri mereka”.

Menurut Adman Nursal (2004:59), pendekatan psikologis yaitu adanya sikap politik para pemberi suara yang menetap, teori ini dilandasi oleh sikap dan sosialisasi. Sikap seseorang sangat mempengaruhi perilaku

politiknya. Terbentuknya persepsi dan sikap ini diawali dengan proses sosialisasi yang panjang yang membentuk ikatan yang kuat dengan partai politik dan menimbulkan identifikasi tanpa didasari.

Pendekatan psikologis ini menggunakan konsep kunci yakni identifikasi partai yang mana proses sosialisasi yang dijalani akan membentuk ikatan psikologis seseorang dengan partai politik atau kandidat tertentu. Identifikasi partai merupakan rasa keterikatan individu terhadap partai sekalipun ia bukan anggota. Perasaan ini tumbuh sejak kecil di pengaruhi oleh orang tua dan lingkungan keluarga. Dengan demikian pendekatan ini saling terkait dengan pendekatan sosiologis dimana identifikasi partai berkaitan dengan pengelompokan sosial.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa Pendekatan Psikologis yaitu pendekatan yang melihat perilaku pemilih sebagai bentukan dari proses sosialisasi yang melahirkan ikatan emosional (identifikasi) yang mengarahkan tindakan politik seseorang dalam suatu pemilihan. Indikator yang digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh pendekatan ini adalah sebagai berikut :

1. Ketokohan, dilihat dari perasaan emosional pemilih yang melandasi pilihannya dengan mempertimbangkan identitas atau ketokohan calon (atau tokoh dibelakang calon) dan tokoh-tokoh panutan yang dihormati oleh pemilih.

2. Identifikasi Partai, yang dilihat dari kesamaan pandangan responden dengan anggota keluarganya terhadap pilihan tertentu serta adanya kesamaan antara partai yang dipilih dengan partai yang dikagumi.

c. Pendekatan Rasional

Adman Nursal (2004:64) menyebutkan bahwa :

”pendekatan rasional terutama berkaitan dengan orientasi utama pemilih, yakni orientasi kandidat. Perilaku pemilih berorientasi isu berpusat pada pertanyaan : apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dalam memecahkan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negara. Sementara orientasi kandidat mengacu pada sikap seseorang terhadap pribadi kandidat tanpa memperdulikan label partai”.

Pendekatan rasional berkaitan dengan pola perilaku pemilih masyarakat, yakni orientasi isu dan orientasi kandidat. Orientasi isu berkaitan dengan peristiwa-peristiwa sosial, ekonomi dan politik tertentu yang kontekstual dengan pemilu bersangkutan terutama peristiwa dramatis, sementara itu pendekatan rasional terhadap kandidat dapat didasarkan pada kedudukan informasi, prestasi dan popularitas pribadi bersangkutan dalam berbagai bidang kehidupan seperti organisasi, kesenian, olahraga dan politik.

Pendekatan rasional mengantarkan pada kesimpulan, bahwa para pemilih benar-benar rasional, para pemilih melakukan penilaian yang valid terhadap tawaran partai. Berdasarkan tindakan komunikasi, Nimmo dalam Adman Nursal (2004:66) menggolongkan pemilih ini sebagai pemberi suara yang rasional. Pemilih rasional itu memiliki

motivasi, prinsip, pengetahuan dan mendapat informasi yang cukup, tindakan mereka bukanlah karena faktor kebetulan atau kebiasaan, bukan untuk diri sendiri melainkan untuk kepentingan umum menurut pikiran dan pertimbangan logis.

Pendekatan rasional merupakan pendekatan yang melihat bahwa pilihan pemilih adalah keputusan rasional pemilih dimana yang dipertimbangkan adalah sebagai berikut :

1. Orientasi visi misi yang diukur dari pengetahuan dan pemahaman serta ketertarikan pemilih terhadap program yang ditawarkan calon.
2. Orientasi kandidat yang diukur dari kualitas kandidat meliputi kedudukan, informasi, prestasi dan popularitas pribadi bersangkutan dalam berbagai bidang kehidupan terkait kompetensinya dalam merealisasikan program yang ditawarkan.

d. Pendekatan Marketing

Dalam Adman Nursal (2004:69-71) menurut pendekatan yang dikembangkan oleh Newman dan Sheth ini terdapat tujuh domain kognitif terpisah dan berbeda yang mempengaruhi perilaku pemilih yakni :

- a. Isu dan kebijakan politik (*issues and policies*), merepresentasikan kebijakan atau program yang diperjuangkan dan dijanjikan oleh partai atau kandidat politik jika menang kelak.
- b. Citra sosial (*social imagery*), menunjukkan stereotif kandidat atau partai (citra kandidat atau partai di mata pemilih) untuk menarik

- pemilih dengan menciptakan asosiasi antara kandidat atau partai dengan segmen-segmen tertentu dalam masyarakat.
- c. Perasaan emosional (*emotional feelings*), dimensi emosional yang terpancar dari kontestan yang ditunjukkan oleh kebijakan politik yang ditawarkan.
 - d. Citra kandidat (*candidate personality*), mengacu pada sifat-sifat pribadi yang penting yang dianggap sebagai karakter kandidat.
 - e. Peristiwa mutakhir (*current events*), mengacu pada himpunan peristiwa, isu, dan kebijakan yang berkembang menjelang dan selama kampanye.
 - f. Peristiwa personal (*personal events*), mengacu pada kehidupan pribadi dan peristiwa yang pernah dialami secara pribadi oleh seorang kandidat.
 - g. Faktor-faktor epistemic (*epistemic issues*), isu-isu pemilihan yang spesifik yang dapat memicu keingintahuan para pemilih tentang hal-hal baru.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga model atau pendekatan perilaku pemilih yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan rasional, kemudian akan diukur besarnya pengaruh dari ketiga pendekatan ini dalam faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku memilih terhadap calon bupati perempuan pada pilkada Pringsewu 2011.

B. Tinjauan Perempuan Dalam Politik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian perempuan adalah orang/manusia yang mempunyai hak, mensturasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui.

Konvensi tentang hak sipil dan politik pada tanggal 16 Desember 1966 yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB pada butir 25, menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan tanpa pembedaan apapun untuk

ikut serta dalam menjalankan kepentingan umum baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang mereka pilih secara bebas. Ia pun berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan-pemilihan berkala dan umum.

Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam pasal 7 memuat bahwa "Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan kehidupan kemasyarakatan negaranya, khususnya menjamin bagi perempuan atas dasar persamaan dengan laki-laki". Adapun hak-hak tersebut adalah :

- a. Untuk memilih dan dipilih
- b. Untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di semua tingkat.
- c. Untuk berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan-perkumpulan non pemerintah yang berhubungan dengan pemerintah dan kehidupan masyarakat.

Dalam buku *Perihal Ilmu Politik* karangan Leo Agustino (2007: 231-235), dibahas beberapa kendala peran perempuan dalam politik yang masih belum dioptimalkan, hal ini bisa dikarenakan beberapa faktor antara lain :

1. Kendala politik

Kaum pria sudah sejak lama mendominasi arena ruang publik politik. Mereka memformulasi aturan main dan mereka juga mendefinisi standar evaluasi dalam medan area tersebut. Beberapa kendala politik yang dihadapi oleh kaum perempuan di Indonesia, diantaranya adalah :

a. Politik kaum pria yang dominatif.

Pria sangat dominan dalam memformulasi aturan-aturan permainan politik dan pria pulalah yang sering mendefinisi standar untuk evaluasi dalam ruang publik tersebut sehingga pada akhirnya kehidupan politik sering diatur sesuai dengan norma, nilai, ketentuan yang dimiliki kaum pria.

b. Kurangnya dukungan partai

Seperti yang diketahui bahwa perempuan memainkan peran penting dalam kampanye dan memobilisasi dukungan di partai-partai politik dukungannya, tetapi mereka tidak memperoleh keuntungan dari kegiatan yang mereka lakukan.

2. Kendala ideologi

Salah satu jargon ideologis yang mengekang aktivitas perempuan adalah adanya ungkapan yang mengatakan, "ketika perempuan menjadi politis, ia berhenti menjadi seorang "ibu". Kendala-kendala ideologis dan psikologis bagi perempuan dalam memasuki ruang publik bukan hanya berupa jargon semata, tetapi juga ialah sebagai berikut :

a. Kondisi sosio-kultur yang mengekang. Di banyak negara termasuk di Indonesia terlalu mengagungkan sistem *patriarki*.

b. Kurangnya kepercayaan. Kurangnya rasa kepercayaan diri adalah salah satu penyebab utama atas kurang keterwakilan perempuan dalam ruang publik politik : parlemen, yudikatif, pemerintahan, hingga partai-partai politik. Kekurangan atau ketidakpercayaan perempuan ini dapat

ditelusuri penyebabnya, antara lain yaitu *pertama*, argumen yang menyatakan bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah dan harus dilindungi. Oleh karena lemahnya perempuan, maka pekerjaan yang cocok bagi mereka adalah pekerjaan dirumah domestik-rumahtangga, *kedua*, Adanya persepsi bahwa "politik" sama dengan "permainan kotor". Anggapan ini telah mengendurkan rasa percaya diri perempuan atas kemampuannya untuk berhadapan dengan proses politik. Persoalan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan maacam sebagainya menjadi permainan kotor yang inheren dalam domain politik.

- c. Peran media massa yang masih kurang mendorong peran perempuan dalam konteks ruang publik politik.

3. Kendala Sosio-Ekonomi

Kondisi sosio-ekonomi memainkan peran yang menentukan dalam rekrutmen anggota legislatif perempuan pada ruang publik politik, baik dalam demokrasi yang baru berkembang maupun demokrasi yang sudah mapan. Tidak perlu dikatakan lagi bahwa status sosio-ekonomi perempuan dalam masyarakat mempunyai pengaruh langsung pada partisipasi perempuan dalam lembaga-lembaga publik formal. Partisipasi perempuan dalam ruang publik politik di Indonesia, dibatasi oleh kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan kurangnya akses informasi.

C. Tinjauan Pemilihan Kepala Daerah

1. Pemilihan Kepala Daerah

Seperti yang diungkapkan oleh Abdul A. Harahap (2005:122), mengatakan bahwa :

”Pilkada langsung merupakan tonggak demokrasi terpenting di daerah, tidak hanya terbatas pada mekanisme pemilihannya yang lebih demokratis dan berbeda dengan sebelumnya, tetapi merupakan ajang pembelajaran politik terbaik dari perwujudan dari kedaulatan rakyat. Melalui pilkada langsung rakyat semakin bergulat, dibandingkan dengan mekanisme sebelumnya dimana kepala daerah ditentukan sejumlah anggota DPRD. Sekarang seluruh rakyat yang mempunyai hak pilih dapat menggunakan hak suaranya secara langsung dan terbuka untuk memilih kepala daerahnya sendiri. Inilah esensi dari demokrasi dimana kedaulatan sepenuhnya ada di tangan rakyat, sehingga berbagai distorsi demokrasi dapat ditekan seminimal mungkin”.

Pilkada langsung seperti yang diatur dalam UU Nomor 32 tahun 2004 pada pasal 56 di ayat-ayatnya berbunyi :

1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

2. Proses Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah

Proses merupakan rangkaian berbagai kegiatan dari struktur kegiatan yang bekerja dalam satu unit kesatuan. Proses pelaksanaan pilkada diartikan sebagai rangkaian tahapan-tahapan kegiatan pilkada di mulai dari

penetapan pemilih, pendaftaran dan penetapan pasangan calon, kampanye, pemungutan dan perhitungan suara serta penetapan, pengesahan, pengangkatan dan pelantikan pasangan calon terpilih.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah konsep yang terjadi dari hubungan antara sebab akibat atau kausal hipotesa antar variabel terikat atau tidak bebas dalam rangka memberikan jawaban sementara terhadap permasalahan yang sedang diselidiki (Sukardi, 2005:97).

Sebagai salah satu instrumen demokrasi, pilkada merupakan sarana untuk mengukur kualitas dan kuantitas partisipasi masyarakat dalam memberikan haknya, sehingga keterlibatan setiap elemen masyarakat menjadi syarat mutlak bagi keberlangsungan demokrasi dan pembangunan di Indonesia khususnya di Kabupaten Pringsewu.

Pada Pilkada Kabupaten Pringsewu tahun 2011, terdapat satu calon bupati perempuan yang mencalonkan diri, yaitu Hi. Ririn Kuswantari S.Sos. Pencalonan Hi. Ririn Kuswantari S.Sos ini, merupakan satu-satunya perempuan yang mencalonkan diri sebagai calon bupati pada Pilkada tahun 2011.

Pada Pilkada Pringsewu 2011 masyarakat Pekon Mataram menjadi bagian dalam proses pemilihan kepala daerah. Masyarakat yang memilih calon bupati perempuan di Pekon Mataram terbilang tinggi yakni sebanyak 1.559 orang

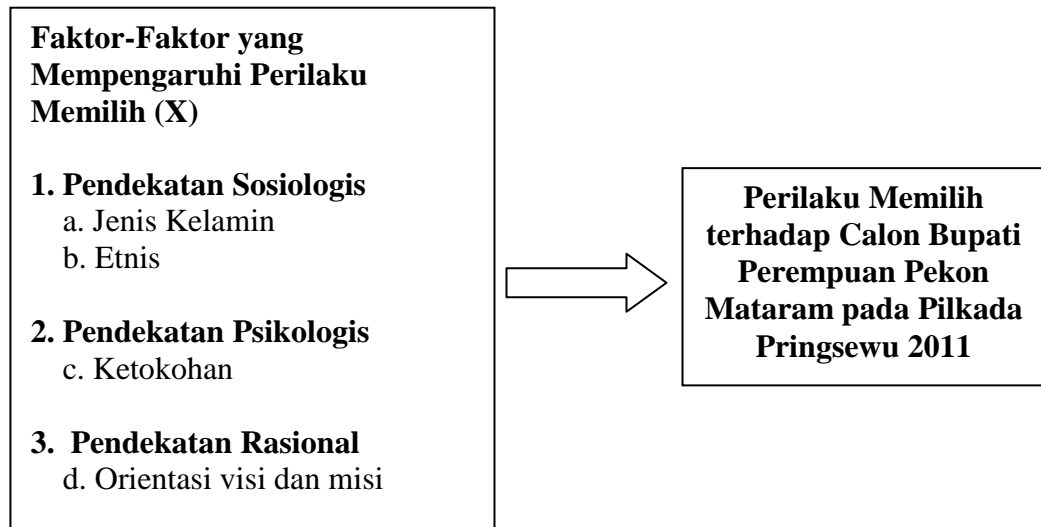
atau 65,55% dari 2.378 orang yang menggunakan suaranya pada Pilkada Pringsewu 2011.

Pada penelitian ini penulis menggunakan konsep perilaku pemilih yang terdiri atas pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan rasional untuk memudahkan penulis dalam mengetahui dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku memilih terhadap calon bupati perempuan dalam Pilkada Pringsewu 2011. Ketiga pendekatan ini kemudian diturunkan dalam beberapa variabel yang digunakan untuk mengukur penyebab perilaku memilih masyarakat Pekon Mataram terhadap calon bupati perempuan yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendekatan Sosiologis yang diukur berdasarkan jenis kelamin dan kesamaan etnis
2. Pendekatan Psikologis yang diukur berdasarkan faktor ketokohan calon bupati perempuan
3. Pendekatan Rasional yang diukur berdasarkan faktor orientasi visi dan misi calon bupati perempuan

Berdasarkan empat faktor dari ketiga pendekatan perilaku memilih tersebut, penelitian ini mencoba menggambarkan dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku memilih masyarakat Pekon Mataram terhadap calon bupati perempuan pada Pilkada Pringsewu 2011.

Bagan Kerangka Pikir



Gambar 1.

E. Hipotesis

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, peneliti mencoba merumuskan hipotesis bahwa diduga faktor jenis kelamin, faktor etnis, faktor ketokohan, dan faktor orientasi visi dan misi calon bupati perempuan berpengaruh dalam perilaku memilih masyarakat terhadap calon bupati perempuan. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H_0 : Tidak terdapat perbedaan proporsi yang signifikan pada faktor yang mempengaruhi perilaku memilih terhadap calon bupati perempuan pada Pilkada Pringsewu 2011 dilihat dari variabel jenis kelamin.

H_a : Terdapat perbedaan proporsi yang signifikan pada faktor yang mempengaruhi perilaku memilih masyarakat Pekon Mataram pada Pilkada Pringsewu 2011 dilihat dari variabel jenis kelamin.

H_0 : Tidak terdapat perbedaan proporsi yang signifikan pada faktor yang mempengaruhi perilaku memilih masyarakat Pekon Mataram pada Pilkada Pringsewu 2011 dilihat dari variabel etnis (suku).

H_a : Terdapat perbedaan proporsi yang signifikan pada faktor yang mempengaruhi perilaku memilih masyarakat Pekon Mataram pada Pilkada Pringsewu 2011 dilihat dari variabel etnis (suku).

H_0 : Faktor ketokohan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap perilaku memilih masyarakat pada Pilkada Pringsewu 2011.

H_a : Faktor ketokohan mempunyai pengaruh signifikan terhadap perilaku memilih masyarakat Pekon Mataram pada Pilkada Pringsewu 2011.

H_0 : Faktor Visi dan Misi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap perilaku memilih masyarakat Pekon Mataram pada Pilkada Pringsewu 2011.

H_a : Faktor Visi dan Misi mempunyai pengaruh signifikan terhadap perilaku memilih masyarakat Pekon Mataram pada Pilkada Pringsewu 2011.